



Sosialisasi "Tolak Politik Uang" Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Sebagai Upaya Melek Politik Di Kalangan Pemilih Muda dalam Pilkada Jakarta 2024

Putri Lestari^{1*}, Andys Tiara², Yulia Rahmawati³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: putrilestari0302@gmail.com^{1*}, andys@uhamka.ac.id²,
yulia.rahmawati@uhamka.ac.id³

Jl. Limau II, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Email korespondensi: putrilestari0302@gmail.com

Abstract: This study aims to understand the socialization carried out by the South Jakarta City KPU in an effort to promote political literacy among young voters in the 2024 DKI Jakarta gubernatorial election. This research focuses on the efforts of the South Jakarta City KPU to socialize young voters about the importance of rejecting money politics, as well as examining the effectiveness of the socialization programs conducted. The methodology used is a descriptive method with a qualitative focus. The results of the study show how this socialization contributes to the increase in political awareness among young voters. This includes measuring their knowledge about voter rights, the electoral process, and the consequences of engaging in money politics. Analysis of the methods and media used in socialization is also an important focus. The research can cover the types of media (such as through film media and socialization) used by the KPU of South Jakarta, as well as how these communication strategies are tailored to attract the attention of young voters. In this case, this research aims to provide a comprehensive overview of how the South Jakarta City KPU conducts the "Reject Money Politics" campaign as an effort to increase political awareness among young voters, as well as the challenges and successes faced in the process.

Keywords: General Election Commission, Pilkada Socialization, Young Voters, Political Literacy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan dalam upaya literasi politik pada kalangan pemilih muda di Pilkada DKI Jakarta 2024. Penelitian ini berfokus dalam upaya KPU Kota Jakarta Selatan untuk menyosialisasikan pemilih muda akan pentingnya menolak politik uang, juga melihat efektivitas dari program sosialisasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana sosialisasi ini berkontribusi terhadap peningkatan melek politik di kalangan pemilih muda. Ini mencakup pengukuran pengetahuan mereka tentang hak-hak pemilih, proses pemilu, dan konsekuensi dari terlibat dalam praktik politik uang. Analisis mengenai metode dan media yang digunakan dalam sosialisasi juga menjadi fokus penting. Penelitian dapat mencakup jenis-jenis media (seperti melalui media film dan sosialisasi) yang digunakan KPU Kota Jakarta Selatan, serta bagaimana strategi komunikasi tersebut disesuaikan untuk menarik perhatian pemilih muda. Dalam hal ini, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana KPU Kota Jakarta Selatan melakukan sosialisasi "Tolak Politik Uang" sebagai upaya untuk meningkatkan melek politik di kalangan pemilih muda, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Kata kunci: Komisi Pemilihan Umum, Sosialisasi Pilkada, Pemilih muda, Literasi Politik

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa dikenal dengan Pilkada di Jakarta 2024 kini telah usai. Setiap pagelarannya selalu diwarnai dengan polemik dan berbagai dinamika didalamnya. Banyak hal yang dapat diamati untuk dianalisis, salah satunya mengenai kesadaran atau melek politik di kalangan pemilih muda di DKI Jakarta, terlebih Jakarta dikenal sebagai kota yang memiliki populasi generasi muda yang cukup besar. Pilkada Jakarta acap kali menjadi sorotan

nasional dan perhatian kerap tertuju pada pemilih muda sebagai ujung tombak karena populasinya yang lebih banyak dibanding kategori pemilih lainnya. Melek politik ini ditandai dengan semakin aktifnya partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan politik, mulai dari demonstrasi, advokasi isu-isu sosial, pemilu, tak terkecuali Pilkada Jakarta 2024.

Pada prosesnya, Pilkada menuntut adanya partisipasi politik dari seluruh masyarakat daerah untuk menyuarakan dan menentukan keinginannya secara bebas dan jujur sebagai sumber legitimasinya, namun melek politik di kalangan pemuda masih menghadapi beberapa tantangan khususnya di Jakarta. Berdasarkan Data KPU menyebutkan bahwa partisipasi politik masyarakat khususnya pemilih muda pada Pilkada Jakarta 2024 menurun dari tahun sebelumnya. Menurut data dari Pelaksana Sub Bagian Pusat Data dan Informasi KPU Kota Jakarta Selatan, dalam Pemilu 2024 jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di angka 1.471.434 jiwa dari 1.766.049 total populasi warga Kota Jakarta Selatan bulan Februari 2024 atau partisipasi pemilih di angka 83,32%, sedangkan dalam Pilkada 2024 jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di angka 1.046.480 jiwa dari 1.748.961 total populasi warga Kota Jakarta Selatan bulan November 2024 atau partisipasi pemilih berada di angka 59,83%. Dari data tersebut menunjukkan fakta bahwa dari Pemilu ke Pilkada 2024 mengalami penurunan mencapai 28,88% dengan selisih 23,48% dan masyarakat Jakarta Selatan kebanyakan yang tidak menggunakan hak suaranya. Problematika melek politik ini menjadi hal vital dikarenakan mayoritas dari pemilih Pilkada tahun 2024.

Dalam PKPU No. 9 tahun 2022 Pasal 28 ayat 2 poin (a) dan (b), menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran poin (a) pemilih. Pemilih yang dimaksud yaitu salah satunya poin (b) pemilih muda” (Prayugo, 2024). Pemilih muda umumnya berusia mulai dari 17 hingga 37 tahun. Apabila ditinjau berdasarkan tahun saat ini, artinya mereka yang saat ini disebut sebagai Generasi Milenial dan Generasi Zoomers atau sering dikenal Generasi Z dan atau lebih sering disingkat sebagai Gen Z. Menurut (Muhtar, 2023), Generasi Milenial lahir antara tahun 1981 sampai tahun 1996 dan berusia 29-44 tahun. Sementara itu Generasi Zoomers lahir antara tahun 1997 dan 2012 setelah Generasi Milenial dan sebelum Generasi Alpha. Generasi tertua dari Milenial ini akan mencapai akhir usia 43 tahun pada tahun 2024, lalu Generasi tertua dari Gen Z ini akan mencapai akhir usia 28 tahun pada tahun 2024 yang dimana mereka sedang memulai tahun pasca pendidikan dengan karir atau mungkin berkeluarga dan generasi termuda dari Gen Z ini ialah mereka yang saat ini berusia 12 tahun pada tahun 2024. Generasi termuda di Milenial

dan Generasi tertua di Gen Z akan menjadi bagian dari kategori pemilih muda dalam Pilkada. Dalam konteks pemilu, pemilih yang berusia 17 hingga 39 tahun sering kali dianggap sebagai pemilih muda, sehingga kedua generasi ini memainkan peran penting dalam menentukan hasil Pilkada (Warren, 2024). Menurut pemaparan Fahmi Zikrilah sebagai komisioner KPU DKI Jakarta di liputan6.com, presentase pemilih Gen Milenial ada 31,5% atau sekitar 2,7 juta jiwa dan pemilih Gen Z ada 18,5% atau sekitar 1,5 juta jiwa (Faiz, 2023). Jika diakumulasikan, maka total pemilih muda di DKI Jakarta sekitar 4,2 juta jiwa dengan presentase 51,47% dari total keseluruhan pemilih.

Pemilih muda merupakan faktor penentu dalam partisipasi politik di Indonesia dan pemilih muda memiliki karakteristik tersendiri dalam berpolitik. Pemilih muda memiliki kesadaran politik dibanding pemilih lainnya karena tingkat literasi politik dari generasi muda dan minat terhadap isu politik lebih tinggi, kesadaran akan berpolitik membuat partisipasi pemilih meningkat dan keterlibatan untuk membahas isu-isu politik (Prasetyo, 2022). Pemikiran yang maju dan ambisi yang tinggi pemilih muda juga menjadi acuan bagi sistem politik karena banyak anak muda yang mempunyai keinginan untuk mengubah tatanan sistem di negeri ini (Zulfa, 2019). Pemilih muda juga memiliki sidat, karakter dan juga latar belakang pengalaman yang berbeda dengan generasi sebelumnya, dimana Generasi Milenial dan Generasi Zoomers sebagian besar dari kalangan pelajar yang berpendidikan, mempunyai ekonomi yang baik, bekerja dan tinggal di daerah perkotaan sehingga memiliki kemampuan menggunakan teknologi dengan baik dan aktif di sosial media (Zulkarnain, 2021).

Partisipasi pemilih muda dalam politik memiliki potensi yang sangat besar untuk membawa perubahan positif. Namun, partisipasi ini juga membawa tantangan tersendiri. Jumlah pemilih muda yang tidak sedikit, membuat mereka terpecah ke beberapa kelompok demokrasi. Hal ini menjadi dampak negatif karena mereka memiliki potensi yang besar untuk menjadi korban pelanggaran pemilihan umum karena kurang memahami konsep aturan dalam Pilkada. Terlalu banyak informasi yang generasi muda dapatkan, juga dapat membuat *miss* informasi antara satu dengan yang lainnya (Putra, 2015). Pemilih muda dalam politik juga rentan terkena polarisasi, manipulasi informasi, dan radikalisme yang mana hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman karena hal tersebut menjadi hal baru untuk mereka. Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan literasi digital, pendidikan politik, dan partisipasi pemuda dalam kegiatan politik yang konstruktif, sebab melek politik pada pemilih muda akan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mencegah praktik politik uang yang merugikan demokrasi.

Dalam proses dan rangkaian Pilkada 2024, terdapat dinamika Pilkada yang merujuk kepada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Hal ini terdiri dari aspek sosial, ekonomi dan aspek politik yang mempengaruhi jalannya rangkaian Pilkada serta partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga merupakan faktor dari dinamika Pilkada, pemilih muda menjadi ujung tombak dari Pilkada 2024 karena populasi pemilih muda di Jakarta lebih banyak dibanding kategori pemilih lainnya. Dalam Pilkada Jakarta, adapun kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus mendapat 50% + 1 suara untuk dapat memenangkan satu putaran. Aturan tersebut dimuat dari Pasal 10 Ayat 2 UU DKJ No. 2 Tahun 2024 (Muliawati, 2024). Dalam mencapai satu putaran, ketiga pasangan Cagub dan Wagub Pilkada DKI Jakarta 2024 mengatur strategi untuk mencapai kemenangan (Mahendra, 2024).

Fenomena dinamika Pilkada lain yang terjadi yaitu praktik politik uang. Banyak pemilih muda yang menaruh harapan kepada calon pemimpin agar bisa bersih dari korupsi dan peduli terhadap isu-isu lingkungan, dan tidak menggunakan cara curang seperti politik uang untuk dapat terpilih menjadi pemimpin. Politik uang merupakan masalah serius yang dihadapi dalam konteks Pilkada di Indonesia. Banyak pemilih muda merasa skeptis terhadap praktik ini, yang dianggap merusak integritas proses demokrasi. Meski pemilih muda terdapat kesadaran akan pentingnya menolak politik uang, tantangan tetap ada dalam mendidik pemilih muda tentang dampak negatifnya serta cara untuk menghindarinya. Hal ini menjadi perhatian bagi KPU Kota Jakarta Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Jakarta 2024 untuk meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih muda Jakarta Selatan agar terhindar dari politik uang, memilih calon pemimpin dengan hati nuraninya sendiri dan tidak terhasut oleh lembaga dan pasangan calon.

Politik uang menjadi salah satu dinamika yang menjadi topik hangat menjelang proses pemilihan. Melek politik pada pemilih muda dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mencegah dinamika dalam proses pemilihan, salah satunya yang mengarah pada praktik politik uang yang merugikan demokrasi. KPU Kota Jakarta Selatan memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan Pilkada yang adil dan transparan sesuai dengan Visi dan Misinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan, yaitu sosialisasi tentang "Tolak Politik Uang". Sosialisasi ini merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan untuk mengedukasi pemilih muda untuk melek politik dan tidak mudah terkena polarisasi, termanipulasi informasi dan radikalisme. Kegiatan ini dilakukan beberapa bulan sebelum diadakannya Pilkada 2024 dan dilaksanakan di berbagai komponen masyarakat dari

yang muda sampai lanjut usia. Untuk pemilih muda, sosialisasi “Tolak Politik Uang” ini dilakukan dengan mendatangi sekolah dan universitas yang ada di Jakarta Selatan dan menayangkan sebuah film yang di produksi oleh KPU RI dan disutradarai oleh Garin Nugroho berjudul “Tepatilah Janji” untuk meningkatkan partisipasi politik dan mengedukasi tentang politik uang di kalangan pemilih muda.

Dalam konteks sosialisasi "Tolak Politik Uang," KPU Kota Jakarta Selatan berperan aktif dalam mendidik pemilih muda mengenai pentingnya memilih secara bijak dan menolak praktik-praktik korupsi dalam politik. Melalui berbagai program edukasi dan Sosialisasi ke berbagai elemen pemilih muda seperti sekolah, kampus dan komponen masyarakat dari umur 17-40 tahun, KPU berusaha meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi. Keterlibatan KPU dalam membangun kesadaran politik di kalangan pemilih muda sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka tidak hanya menjadi komoditas dalam kontestasi politik.

Pemilih muda yang melek politik cenderung lebih kritis dalam mengevaluasi janji-janji politik yang disampaikan oleh para calon. Mereka tidak mudah terbuju oleh iming-iming materi semata, melainkan lebih memperhatikan program kerja dan visi-misi calon yang realistis dan berdampak positif bagi masyarakat. Pemilih muda yang melek politik dapat menjadi agen perubahan dengan mengajak teman sebaya dan masyarakat sekitar untuk menolak politik uang. Mereka dapat menyebarkan informasi yang benar dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Jakarta 2024. Pemilih muda yang aktif di media sosial dapat membentuk opini publik yang menolak politik uang. Mereka dapat memanfaatkan platform digital untuk melakukan kampanye politik bersih dan berintegritas.

Pemuda perlu diberikan akses yang mudah terhadap informasi yang akurat dan relevan tentang politik. Pemuda harus didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik, salah satunya peran dari Lembaga pengawas pemilu perlu dilengkapi dengan sumber daya yang cukup dan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mencegah dan menindak praktik politik uang. Dengan demikian, melek politik pada pemilih muda bukan hanya sekadar harapan, tetapi juga sebuah investasi untuk masa depan demokrasi yang lebih baik. Atas dasar tersebut, maka peneliti tertarik untuk memahami bagaimana “Sosialisasi "Tolak Politik Uang" Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Sebagai Upaya Melek Politik Di Kalangan Pemilih Muda dalam Pilkada Jakarta 2024”.

KAJIAN PUSTAKA

Sosialisasi

Sosialisasi yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan merupakan langkah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemilih muda dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Dalam jurnal penelitian (Wahyudi, 2022), bahwa KPU melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, meskipun sosialisasi dijalankan dengan baik, tantangan utama nya terletak pada antusiasme masyarakat dan rasa kepercayaan masyarakat menurun, dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Menurut jawaban (Zainab, 2024) sebagai Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM KPU Kota Jakarta Selatan, sosialisasi dalam rangkaian Pilkada 2024 ada berbagai macam, ada sosialisasi pendaftaran DPT, sosialisasi pemindahan DPTb, sosialisasi daftar pasangan calon dan visi misinya, salah satunya adalah sosialisasi tolak politik uang. Politik uang sudah menjadi tradisi turun temurun dalam usaha para pasangan calon untuk dapat menang, jadi masyarakat harus lebih di edukasi bahaya dan dampak yang terjadi jika menerima uang dari para pasangan calon. Melalui sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman yang pasti tentang bahaya praktik politik uang, yang sering kali mengganggu proses demokrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik pemilih tentang hak-hak mereka dan pentingnya memilih tanpa tekanan atau imbalan materi. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari politik uang, diharapkan masyarakat dapat menolak tawaran yang merugikan dan berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada Jakarta 2024.

Politik Uang

Politik uang merupakan praktik untuk memberikan sesuatu kepada pemilih dengan maksud dan tujuan untuk memengaruhi pilihan mereka dalam Pilkada. Praktik ini melibatkan transaksi dimana calon atau tim sukses pasangan calon memberikan uang atau barang seperti sembako sebagai sebuah imbalan dengan harapan mendapatkan suara masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Menurut (Begouvic, 2021), pemimpin kepala daerah yang berhasil terpilih namun dengan cara menggunakan praktik politik uang, biasanya menjalankan tugasnya dengan tidak amanah dan menjadi pemimpin yang korupsi. Selain itu, praktik ini menciptakan sebuah budaya yang terbentuk secara terus-menerus dalam rangkaian Pilkada, dimana masyarakat menganggap bahwa menerima imbalan materi dari kandidat pasangan calon sebagai hal yang wajar dalam proses pemilihan. Sehingga, mengurangi kualitas demokrasi dan integritas pemimpin yang terpilih nantinya. Praktik politik uang di kalangan pemilih muda, terutama di kalangan

Generasi Milenial dan Generasi Z, semakin terlihat dalam konteks Pilkada di Indonesia. Penelitian (Fitriyah, 2014) menunjukkan bahwa banyak pemilih muda cenderung menerima tawaran uang sebagai bagian dari proses pemilihan, dikarenakan alasan ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang efek jangka panjang dari tindakan tersebut. Banyak dari mereka merasa terpaksa untuk menerima tawaran ini karena situasi ekonomi yang tidak menguntungkan, serta ketidaktahuan mereka mengenai dampak negatif dari praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi. Ini menunjukkan bahwa edukasi politik yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya memilih berdasarkan program dan visi calon, bukan berdasarkan keuntungan materi. Untuk memutus mata rantai politik uang, masyarakat harus di berikan pemahaman tentang politik agar lebih melek politik dan tidak mudah menerima segala macam bentuk politik uang dari pasangan calon.

Melek Politik (*Political Literacy*)

Melek Politik merupakan kemampuan setiap individu untuk memahami dan mengerti isu-isu politik, hak-hak sebagai pemilih serta proses bagaimana terjadinya pemilihan umum. Ini mencakup pengetahuan tentang bagaimana sistem dalam politik dapat bekerja dan cara berpartisipasi dengan efektif sebagai masyarakat. Menurut (Unjianti, 2021), melek politik dilakukan kepada anak muda karena anak muda lebih kritis dan lebih paham tentang kemajuan bangsa, dan lebih berpartisipasi dalam dunia politik. Namun, pendidikan politik juga diperlukan untuk masyarakat khususnya pemilih muda agar lebih mengetahui bagaimana arus dan kinerja para pemimpin dari visi dan misi nya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan paradigma Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan paradigma yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk dengan interaksi sosial dan pengalaman dari setiap individu. Dalam paradigma ini, pengetahuan dianggap sebagai hasil konstruksi yang dilakukan untuk membangun pengalaman setiap individu, sehingga realitas dinilai sebagai sesuatu yang dinamis dan subjektif (Solichin, 2021). Realitas sosial yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu "Tolak Politik Uang" Sebagai Gerakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam Upaya Melek Politik Di Kalangan Pemilih Muda dalam Pilkada Jakarta 2024. Pendekatannya adalah pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang memiliki fokus untuk pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku seseorang. Dalam penelitian pendekatan ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan tidak dalam berbentuk angka. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk

menggali makna, persepsi, dan konteks dari subjek yang sedang diteliti, sehingga dapat memahami bagaimana caranya manusia membangun realitas sosial (Muhammad, 2020). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis realitas sosial secara mendalam. Jenis penelitian ini mempunyai menggunakan informan kunci dan tambahan dan analisis datanya menggunakan teori triangulasi untuk keabsahan data karena jenis penelitian ini bersifat sederhana dan hasilnya tidak dibuat-buat (Dianita, 2021).

Metode yang digunakan adalah Studi kasus. Studi kasus merupakan metode untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks suatu permasalahan. Metode studi kasus menekankan pada pengumpulan data yang mendalam dan analisis terhadap kasus yang spesifik baik dari individu, kelompok, organisasi atau suatu fenomena yang terjadi (Novidayanti, 2023). Studi kasus menurut (Yin, 2014) merupakan metode penelitian yang empiris dengan menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Dalam metode penelitian studi kasus, teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur, dokumentasi, observasi partisipan dan wawancara mendalam kepada informan kunci dan juga informan tambahan, yaitu :

Tabel 1 informan

No	Nama Informan Kunci	Status
1.	Muhammad Taqiyuddin	Ketua KPU Kota Jakarta Selatan
2.	Zainab Muthiah, SIP	Pelaksana Sub. Bagian Parhumas dan SDM
No	Nama Informan Tambahan	Status
3.	A.F dan F.M.I	Pemilih Muda
4.	Y.K.S.H	Narasumber

Studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dokumentasi, observasi partisipan dan studi literatur agar peneliti tidak hanya menangkap makna dari sesuatu yang tampak, namun juga mengetahui yang tidak tampak, sehingga mendapatkan hal-hal mendalam yang tidak dapat diperoleh oleh orang biasa saja (Rahardjo, Triangulasi dalam penelitian kualitatif, 2010). Teknik analisis data yang digunakan dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman 3 tahap utama yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Selain itu, ada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (Zulfirman, 2022). Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil dengan cara menggabungkan beberapa poin

yang penting dari berbagai sumber data, metode dan perspektif (Winaryati, 2019). Teori yang digunakan; yaitu *Communicative Constitution of Organizations* (CCO) dan kampanye *Ostergaard*. Teori CCO ini merupakan teori yang menggambarkan bagaimana bentuk dan proses komunikasi dan tujuan didalam sebuah organisasi, dan cara jaringan diluar organisasi berpengaruh dalam proses komunikasi (Fitriani, 2019). Dalam penelitian ini, teori CCO berpengaruh dalam pemilihan kriteria SDM menuju keberhasilan sosialisasi KPU Kota Jakarta Selatan. Tidak kalah penting yaitu kampanye *Ostergaard* yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Leon Ostergaard yang mempunyai pendekatan terstruktur saat melakukan kampanye sosialisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, pemikiran dan perilaku publik terhadap isu tertentu sehingga KPU Kota Jakarta Selatan melakukan sosialisasi tolak politik uang untuk mempengaruhi pemikiran pada pemilih muda supaya berpikir kritis tentang isu politik uang saat Pilkada 2024 (Normawati, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang dalam Pilkada Jakarta 2024

Politik uang merupakan suatu fenomena menjelang pemilihan umum yaitu praktik politik transaksional dengan menggunakan uang atau barang untuk mempengaruhi, keputusan hak pilih orang lain untuk memilih. Politik uang digunakan oleh oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya secara pragmatis, dan membeli hak suara pemilih dengan sumber dayanya yaitu uang atau barang agar orang lain memilih dia menjadi pemimpin (Muthiah, Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM KPU Kota Jakarta Selatan, Wawancara pada Selasa, 7 Januari 2025).

Praktik politik uang di kalangan pemilih muda khususnya dalam konteks Pilkada Jakarta 2024 merupakan fenomena yang menjadi sorotan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pemilih muda, termasuk dari Generasi Milenial dan Generasi Z cenderung menerima praktik politik uang sebagai bagian dari rangkaian pesta demokrasi dari proses pemilihan kepala daerah. Banyak dan tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa politik uang adalah hal yang wajar dan lumrah. Faktor utama terjadi politik uang ini dilihat dari struktur sosial masyarakat di Indonesia yang kebanyakan berasal dari kelas menengah sampai menengah kebawah. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran akan pemilihan jangka panjang. Mereka masih beranggapan bahwa calon yang memberikan uang, akan menyejahterakan mereka di masa depan. Banyak generasi Milenial dan Generasi Z sebagai pemilih muda yang awam dan belum mengerti politik, masyarakat oportunistik dan pragmatis pasti akan menerima politik uang tersebut.

Menurut Zainab Muthiah sebagai pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM KPU Jakarta Selatan, dampak dari politik uang pada partisipasi pemilih muda di Pilkada DKI Jakarta ada dua sisi. Pertama, politik uang bisa memaksa dan menyuruh seseorang untuk memilih. Kedua, politik uang bisa menyuruh seseorang untuk tidak menggunakan hak suaranya sama sekali. Jadi, politik uang bisa menyuruh orang untuk memilih calon tertentu seperti yang dilakukan oleh kebanyakan partai politik, namun politik uang juga bisa meminta seseorang untuk menggunakan hak suaranya dengan tidak benar atau tidak menggunakan hak suaranya. Dalam Pilkada 2024, ada sebuah gerakan yang bernama GERCOS yaitu “Gerakan Coblos Bersama” yang membuat orang datang ke TPS namun menggunakan hak suaranya secara tidak benar dengan menyoblos seluruh kandidat calon. Hal ini dapat dihitung sebagai partisipasi pemilih dalam Pilkada namun suara yang diberikan tidak terakomodir sehingga suara terhitung tidak sah. Sehingga, banyak masyarakat terutama pemilih muda yang sudah memiliki keluarga di kalangan menengah kebawah belum bisa memikirkan dampak jangka panjang tentang pemimpin yang dipilih dengan cara politik uang. Dampak politik uang bagi pemilih muda jika pemimpin itu terpilih karena praktik politik uang, maka akan merasakan dipimpin selama kurang lebih 5 tahun dengan pemimpin yang tidak kompeten dan akan tersiksa dengan kebijakan-kebijakan baru yang dirasa merugikan masyarakat.

Praktik transaksional ini tentu mempengaruhi kualitas dari pemimpin yang akan memimpin suatu daerah tertentu. Pemimpin yang terpilih tentu tidak kredibilitas dan tidak kompeten dalam memimpin suatu daerah, dan pemimpin seperti ini akan terlibat dalam praktik korupsi setelah terpilih. Ini merupakan siklus yang sudah banyak terjadi di pemerintahan dan sangat berpengaruh dalam kebijakan dan keputusan yang diambil. Dampaknya begitu besar terhadap demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang menjadikan calon yang terpilih menjadi tidak representatif karena dipilih oleh pemilih secara tidak jujur atas pilihannya, praktik ini akan menggeser calon pemimpin yang kompeten dalam memimpin daerah.

Praktik politik uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) huruf “J” yang menyatakan bahwa, (1) *“Penyelenggara, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”*. Juga dalam Pasal 286 ayat (1) yang menyatakan bahwa, (1) *“Melarang pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan pemilih”*. Sanksi bagi pelaku politik uang diatur juga dalam UU Pemilu pasal 523 ayat (1) yang menyatakan bahwa (1) *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau*

tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta” (Rizki, 2023).

Walaupun sudah ada pidana yang mengatur tentang politik uang, masih banyak oknum yang melakukan dan menerima uang dari salah satu pendukung atau tim sukses pasangan calon. Seorang pemilih muda laki-laki yang berdomisili di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berinisial F.M.I menceritakan pengalamannya melihat langsung praktik politik uang di daerahnya. Ia mengaku bahwa pada pagi hari sebelum pelaksanaan Pilkada 2024, ada yang datang dan mengetuk pintu temannya dan memberikan amplop yang berisi uang untuk memilih kandidat calon tertentu, biasanya hal ini disebut dengan “serangan fajar”. Hal yang sama juga di alami oleh pemilih muda perempuan yang berdomisili di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berinisial A.F melihat praktik politik uang yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Karena ia saat itu belum mengerti, jadi ia tidak menegur orang-orang yang memberikan amplop dan sembako ke orang tuanya, namun setelah tahu, ia mengedukasi orang tuanya bahwa hal yang dilakukan tidak benar dan dapat berpengaruh negatif kedepannya. A.F sebagai pemilih muda juga memberikan masukan bagi masyarakat untuk dapat melawan praktik politik uang. Jangan pernah takut untuk menolak karena kebebasan hak memilih adalah hak seluruh warga negara Indonesia dan jika melihat atau menerima politik uang, laporkan kepada pihak yang berwenang seperti Bawaslu dan KPU. Dukung dan pilih kandidat sesuai hati nurani dengan melihat rekam jejak baik dari Visi dan Misi, ataupun dari kampanye yang dilakukan sebelum Pilkada.

Meningkatkan kesadaran memilih masyarakat akan bahaya dari politik uang juga menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Upaya KPU Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan kesadaran para pemilih yaitu dengan memberikan kecerdasan memilih kepada masyarakat berupa sosialisasi secara tatap muka, sosialisasi *online* yang dilakukan melalui sosial media Instagram dan iklan layanan masyarakat. Selain itu, sosialisasi kampanye tolak politik uang ini juga harus disuarakan oleh orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Jika konteksnya adalah pemilih muda , maka para *public figure* atau orang yang memiliki peran penting melakukan sosialisasi berupa arahan atau pidato mengenai tolak politik uang kepada masyarakat, dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan pemikiran untuk tidak melakukan politik uang. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menolak politik uang karena dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Jadi tentunya sosialisasi ini harus dijalankan secara masif dan juga terstruktur dari seluruh kalangan elemen masyarakat dari

tingkat atas menengah maupun bawah jadi semuanya harus bersinergi untuk melawan politik uang itu sendiri dan bukan dari KPU saja.

"Tolak Politik Uang" Sebagai Gerakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam Upaya Melek Politik Di Kalangan Pemilih Muda Pada Pilkada Jakarta 2024

Tantangan terberat dari KPU Kota Jakarta Selatan dalam Pilkada 2024 ini yaitu menurunnya partisipasi masyarakat karena iklim politik yang membuat pemilih menjadi lebih apatis juga menjadi tantangan terberat. Mengedukasi masyarakat terutama pemilih muda tidak mudah karena mereka memiliki pemikiran dan keyakinan tersendiri terhadap calon pemimpin. Selain itu, meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS saat hari pemungutan suara. Mengingat pelaksanaan Pilkada kali ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilu yaitu tahun 2024, membuat masyarakat merasa jenuh dengan urusan politik yang terjadi di satu tahun. Begitupun dengan adanya dugaan praktik *money politic* yang marak terjadi di pelaksanaan Pilkada Jakarta, membuat masyarakat merasa tidak yakin dengan Pasangan Calon yang sedang mencalonkan diri karena dapat menurunkan kualitas Pasangan Calon tersebut ketika mereka melakukan politik uang untuk mendulang suara di kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 (Taqiyuddin, Ketua KPU Kota Jakarta Selatan, Wawancara Pada Selasa, 7 Januari 2025).

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU membebaskan Partai Politik untuk mengkreasikan metode kampanye dengan semenarik mungkin untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih tanpa harus melakukan politik uang. Para pemilih juga harus aktif mencari info terkait calon yang akan mereka pilih. KPU Kota Jakarta Selatan selaku penyelenggara Pemilu dan Pemilihan telah melaksanakan rangkaian sosialisasi dan pendidikan pemilih guna mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam politik uang dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang mereka yakini tanpa paksaan dari pihak manapun.

Salah satu sarana sosialisasi tolak politik uang yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan kepada pemilih muda adalah menggelar acara nonton bareng film "Tepatilah Janji" yang dirilis oleh KPU RI dan di sutradarai oleh Garin Nugroho dalam rangka peringatan hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur dan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2024 di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Penayangan film untuk kalangan pemilih muda dianggap sebuah sosialisasi yang efektif bagi pemilih muda. Mengingat menonton film sudah menjadi hobi dan sumber pembelajaran baru bagi Generasi Milenial dan Generasi Z, selain itu

menonton film juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk lebih berkembang dan maju (Pratomo, 2019).

Dalam melakukan sosialisasi berupa penayangan film ini, berkaitan erat dengan teori *Communicative Constitution of Organizations* (CCO). yang menekankan bahwa komunikasi merupakan elemen fundamental dalam pembentukan dan pengelolaan suatu organisasi. Robert McPhee mengemukakan mengenai *Communicative Constitution of Organizations* (CCO) / Konstitusi Komunikatif Organisasi yang merupakan sebuah perspektif yang memandang bahwa komunikasi bukan hanya sekadar alat yang digunakan dalam organisasi, melainkan komunikasi itu sendiri yang menciptakan dan membentuk organisasi. organisasi adalah produk dari interaksi komunikasi yang terus-menerus. Implikasi Teori CCO terhadap sosialisasi pemilih muda melalui penayangan film salah satunya yaitu komunikasi sebagai pencipta realitas.

Komunikasi sebagai pencipta realitas dalam konteks KPU Kota Jakarta Selatan menunjukkan bahwa proses komunikasi tidak hanya berfungsi untuk mencerminkan keadaan yang ada, tetapi juga untuk membentuk dan mengubah persepsi serta pemahaman masyarakat tentang pemilu. Dalam hal ini, teori CCO (*Communication Constitutes Organization*) sangat relevan, karena melalui strategi komunikasi yang diterapkan, KPU dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap pemilu. KPU Kota Jakarta Selatan juga melakukan sosialisasi langsung melalui tatap muka dan diskusi secara langsung untuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Interaksi ini membantu menciptakan dialog dua arah yang memperkaya pemahaman tentang proses Pilkada dan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara seperti KPU. Untuk mendapatkan kepercayaan dan didengar oleh masyarakat, sosialisasi harus dilakukan oleh komponen atau orang-orang yang paham mengenai tahapan Pilkada 2024.

KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan 5 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk setiap kecamatan di Jakarta Selatan dan juga 3 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk setiap Kelurahan di Jakarta Selatan yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi di daerah masing-masing. Untuk dapat kandidat yang berkompeten, KPU Kota Jakarta Selatan mengadakan seleksi. Dimulai dari seleksi berkas dimana orang yang mau mencalonkan diri, harus menetap dan memiliki KTP sesuai dengan domisili di Jakarta Selatan. Seleksi kedua yaitu wawancara mengenai seputar pemilihan umum dan teknis yang dilakukan selama rangkaian Pilkada berlangsung sampai selesai. Merekrut PPK dan PPS ini dilaksanakan 6 bulan sebelum Pilkada dilaksanakan.

Orang-orang yang terpilih, nantinya akan dilakukan bimbingan teknis oleh KPU Kota Jakarta Selatan untuk melakukan segala jenis tahapan Pilkada salah satunya yaitu sosialisasi. Setelah mendapatkan ilmu sosialisasi yang dipaparkan oleh Sub Bagian Parhumas dan SDM, PPK dan PPS ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Jakarta Selatan dengan didampingi oleh Pelaksana dan Staff Sub Bagian Parhumas dan SDM di setiap kegiatan sosialisasinya.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan peserta selama proses sosialisasi yaitu peserta diminta menonton terlebih dahulu film “Tepatilah Janji”, setelah itu diadakan tanya jawab seputar film yang telah ditayangkan dan jika pertanyaannya benar akan diberikan *merchandise*. Untuk sosialisasi menonton film “tepatilah janji” lebih ditargetkan kepada pemilih muda terutama usia termuda Generasi Milenial dan Generasi Z karena menonton film bagi pemilih muda lebih memberikan kesan, terlebih lagi hobi dan kegemaran dari pemilih muda adalah menonton film sehingga memberikan ilmu tentang pilkada yang menyenangkan dan tidak membosankan.

Salah satu pemilih muda, A.N.P yang mengikuti kegiatan sosialisasi di Universitas Teknologi Muhammadiyah memberikan kesan bahwa film “Tepatilah Janji” berhasil menyampaikan pesan-pesan yang penting khususnya tentang bahayanya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin yang baik dan tepat. Film ini juga menyadarkan para anak muda betapa pentingnya perannya sebagai pemilih muda untuk pemimpin Indonesia yang lebih baik. Semoga kegiatan menonton film bersama ini menyadarkan anak muda untuk lebih peduli dengan proses demokrasi yang sehat di Indonesia.

Proses Pra sosialisasi dilakukan KPU Kota Jakarta Selatan dari 2 tahun sebelum Pemilu dan Pilkada dilakukan. 2 tahun sebelum pemilihan, biasanya KPU Kota Jakarta Selatan melakukan sosialisasi mengenai pemilih pemula dan apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi seorang pemilih, memberikan edukasi mengenai pentingnya memilih untuk kemajuan bangsa Indonesia. 1 tahun sebelum pemilihan, KPU Kota Jakarta Selatan melakukan sosialisasi lebih intens lagi terhadap bahaya dari golput dan politik uang, memberikan edukasi tentang tahapan pemilihan. 6 bulan sebelum pemilihan, melakukan sosialisasi mengenai pasangan calon, memperkenalkan visi misinya kepada masyarakat, melakukan edukasi tentang pindah memilih (jika ada pekerjaan pindah kota mendadak saat hari H pemilihan), sosialisasi mengenai cek daftar pemilih tetap (DPT), edukasi lebih mendalam kepada seluruh pemilih di masyarakat. Berdasarkan PKPU No. 9 tahun 2022 pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa (1) *pemilih meliputi dari pemilih muda, pemilih pemula, pemilih disabilitas, kelompok*

marjinal, komunitas, kelompok keagamaan dan pemilih perempuan. Dan melakukan sosialisasi dengan pemutaran film “Tepatilah Janji” yang di buat oleh KPU RI, karya sutradara Garin Nugroho yang di rilis tanggal 9 Agustus 2024 yang mengangkat tentang isu politik menjelang Pilkada 2024. Film ini diproduksi sebagai bagian dari sosialisasi KPU untuk menyosialisasikan mengenai dinamika politik. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan isu politik kepada masyarakat dengan cara yang lebih menghibur dan mudah dipahami.

KPU menetapkan prosedur yang jelas mengenai bagaimana sosialisasi dilakukan. Ini termasuk penjadwalan acara, format penyampaian informasi, dan media yang digunakan untuk menjangkau masyarakat. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara konsisten dan terorganisir. KPU mengembangkan standar komunikasi yang harus diikuti oleh semua komponen yang terlibat dalam sosialisasi. Ini mencakup penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penyampaian informasi yang akurat dengan membuat *power point* untuk sosialisasi, dan cara berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan usia dan pengelompokan tempatnya. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, KPU mengadakan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan tersebut bersama dengan PPK dan PPS. Umpan balik dari peserta sosialisasi juga dikumpulkan untuk memperbaiki proses di masa mendatang. Ini menunjukkan bahwa KPU berkomitmen untuk terus meningkatkan metode sosialisasinya berdasarkan pengalaman dan masukan dari masyarakat.

Dalam konteks Aliran Posisi Institusional, interaksi KPU dengan lingkungan eksternalnya sangat penting, terutama dalam kegiatan sosialisasi Pilkada 2024. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai lembaga dan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai pemilu disampaikan secara efektif kepada masyarakat. Diatas KPU, ada Bawaslu yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan sesuai dengan regulasi pemilu dan tidak ada pelanggaran yang terjadi selama proses sosialisasi. Untuk menjangkau masyarakat, KPU Kota Jakarta Selatan tidak bisa langsung terjun menemui masyarakat, ada struktural yang harus dilewati. Salah satunya dengan meminta bantuan kepada pemerintah daerah, termasuk dinas terkait seperti Camat atau Lurah. Camat atau Lurah bekerja sama dengan KPU dalam melakukan sosialisasi agar lebih menjangkau masyarakat lokal. Selain itu, KPU Kota Jakarta Selatan juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan proses demokrasi.

Kampanye Ostergaard

Kampanye "Tolak Politik Uang" yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Selatan mengikuti pendekatan terstruktur yang diusulkan oleh Leon Ostergaard, yaitu “Kampanye

Ostergaard". Dalam teori ini, Awareness (kesadaran), attitude (sikap), dan action (tindakan) adalah tiga elemen penting yang harus dicapai. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran pemilih muda tentang bahaya politik uang, KPU Kota Jakarta Selatan berusaha untuk mengubah pandangan pemilih muda tentang politik uang dan mendorong tindakan nyata untuk menolak segala macam praktik politik uang selama Pilkada 2024. KPU kota Jakarta selatan mempunyai harapan untuk dapat mengurangi praktik politik uang di kalangan pemilih muda dengan menggunakan metode sosialisasi yang interaktif dan edukatif.

Pada "Tolak Politik Uang" Sebagai Gerakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam Upaya Melek Politik Di Kalangan Pemilih Muda Pada Pilkada Jakarta 2024 ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam sosialisasinya, yakni mencakup;

A. Analisis Situasi

Pengadaan kegiatan Sosialisasi "Tolak Politik Uang" ini atas dasar perlindungan demokrasi dan integritas pengadaan pemilihan umum. Dasar permasalahannya karena politik uang merupakan tindak pidana dan pelanggaran kampanye yang merusak demokrasi. Dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, praktik politik uang dilarang keras karena dapat mempengaruhi kebebasan hak pemilih dan juga dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Praktik politik uang juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencegah dan mengeliminasi praktik ini guna menjaga kebersihan dan integritas proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. KPU Kota Jakarta Selatan mengetahui akan pelanggaran kampanye berdasarkan survei-survei dari pendapat publik yang menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap praktik politik uang. Jadi, sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.

Target audiens utama sosialisasi tolak politik uang adalah pemilih muda seperti pelajar dan mahasiswa. Alasannya karena generasi muda lebih rentan terhadap manipulasi politik uang karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam proses demokrasi. Edukasi awal sangat penting untuk membentuk pola pikir yang kuat dan independen. Mahasiswa dan pelajar memiliki potensi besar untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi yang benar, KPU Kota Jakarta Selatan dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam proses Pilkada 2024 dan mendorong mereka untuk menolak praktik politik uang.

Untuk melaksanakan sosialisasi kepada pemilih muda, KPU Kota Jakarta Selatan bersama PPK dan PPS melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan pesan untuk menolak praktik politik uang. KPU Kota Jakarta Selatan dan komponen yang melakukan sosialisasi mengadakan aktivitas langsung seperti seminar, *workshop*, menonton film bersama dan diskusi terbuka untuk memperkuat pesan tentang bahaya politik uang. Aktivitas ini memungkinkan interaksi langsung dengan pemilih muda dan meningkatkan kesadaran mereka tentang topik ini. KPU Kota Jakarta Selatan juga menggunakan media sosial Instagram dengan nama @jakselkpu untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya menolak praktik politik uang. Strategi ini memungkinkan KPU mencapai masyarakat yang lebih luas.

B. Implementasi

Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Jakarta Selatan merancang program sosialisasi yang terstruktur dengan menetapkan tujuan spesifik, yaitu meningkatkan kesadaran pemilih muda tentang bahaya politik uang. Rencana ini mencakup pengembangan materi edukatif yang relevan dan menarik bagi pemilih muda, seperti presentasi interaktif dan menonton film yang mengarah pada tolak politik uang. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Melalui berbagai metode, seperti seminar, diskusi interaktif, dan penggunaan media sosial, KPU Kota Jakarta Selatan berusaha menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah politik masa depan. KPU Kota Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pesan sosialisasi. Dengan melibatkan pelajar dan mahasiswa, KPU tidak hanya memberikan edukasi tentang pentingnya menolak praktik politik uang tetapi juga membangun sikap kritis di kalangan pemilih muda. Data dan survei yang menunjukkan tingginya kerentanan pemilih muda terhadap tawaran politik uang menjadi dasar permasalahan yang mendorong KPU untuk melaksanakan sosialisasi ini. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini diharapkan dapat menciptakan generasi pemilih yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan berani menolak tawaran yang merugikan integritas bangsa.

C. Evaluasi

Proses evaluasi KPU Kota Jakarta Selatan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan dari PPK, PPS, hasil survei, serta umpan balik dari pemilih muda mengenai pelaksanaan sosialisasi. Data ini mencakup informasi tentang partisipasi pemilih, efektivitas metode sosialisasi, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap Pilkada 2024. KPU Kota Jakarta Selatan juga rutin mengadakan rapat evaluasi untuk membahas sejauh mana kegiatan sosialisasi dan rencana sosialisasi ke depannya yang lebih efektif, dan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengidentifikasi tantangan dan masalah yang dihadapi selama proses sosialisasi.

KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda yaitu Generasi Milenial dan Generasi Z, sosialisasi "Tolak Politik Uang" yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan menjadi langkah krusial menjelang Pilkada 2024. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah praktik politik uang yang merusak integritas pilkada, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan melibatkan pelajar dan mahasiswa, KPU berusaha menciptakan generasi pemilih yang cerdas dan kritis, yang mampu menolak tawaran yang dapat merugikan masa depan politik mereka.

Dasar permasalahan yang mendasari sosialisasi ini adalah tingginya risiko praktik politik uang, terutama di kalangan pemilih muda yang mungkin kurang memiliki pengalaman dalam proses Pilkada. Dari data yang dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa banyak pemilih muda masih rentan terhadap tawaran politik uang, sehingga sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran mereka. Melalui pendekatan yang interaktif dan informatif, KPU Kota Jakarta Selatan berupaya untuk menjelaskan konsekuensi dari politik uang dan mendorong sikap kritis terhadap tawaran tersebut.

Dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan pemerintah setempat, KPU Kota Jakarta Selatan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membangun jaringan dukungan untuk menolak praktik politik uang. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan akan tercipta budaya politik yang lebih sehat di kalangan pemilih muda, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu dengan cara yang jujur dan adil. Dengan demikian, sosialisasi "Tolak Politik Uang" merupakan bagian integral dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa suara pemilih muda tidak hanya didengar tetapi juga dihargai dalam proses pengambilan keputusan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Begouvic, M. E. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia. *media.neliti.com*, 106.
- Faiz, N. (2023, Juli 28). *KPU DKI Jakarta: Lebih dari 50 Persen Pemilih DKI Gen Z dan Millennial*. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5356228/kpu-dki-jakarta-lebih-dari-50-persen-pemilih-dki-gen-z-dan-millennial?page=2>
- Fitriani, D. R. (2019). Pola Komunikasi Internal Melalui Pesan Digital Pada PT. Indosiar Visual Mandiri. *ejournal.gunadarma.ac.id*, 167-168.
- Fitriyah. (2014). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *media.neliti.com*.
- Mahendra, K. (2024, Desember 4). *Menilik Potensi Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran*. (Tempo) Dipetik Desember 29, 2024, dari www.tempo.co: <https://www.tempo.co/pemilu/menilik-potensi-pilkada-jakarta-berlangsung-dua-putaran-1176625>
- Muhtar. (2023, Mei 22). *Mengenal 6 Macam Generasi di Indonesia Sesuai Tahun Lahir, Kamu Termasuk yang Mana?* Diambil kembali dari uici.ac.id: <https://uici.ac.id/mengenal-6-macam-generasi-di-indonesia-sesuai-tahun-lahir-kamu-termasuk-yang-mana/>
- Muliawati, A. (2024, November 27). *KPU DKI Jelaskan Aturan Pilkada 1 Putaran: 50% Lebih atau 50% Plus 1 Suara*. (Detik News) Dipetik Desember 2024, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/pilkada/d-7660002/kpu-dki-jelaskan-aturan-pilkada-1-putaran-50-lebih-atau-50-plus-1-suara>

- Muthiah, Z. (2025, Januari 7). Pelaksana Sub. Bagian Parhumas dan SDM KPU Kota Jakarta Selatan. (P. Lestari, Pewawancara)
- Normawati. (2018). Pengaruh Kampanye "Let's Disconnect to Connect" Terhadap Sikap Anti Phubbing. *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 7 No. 3, 160. Diambil kembali dari <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/view/1665/988>
- Novidayanti, M. (2023). Studi Kasus Siswa Lamban Belajar Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan. *digitalib.iainkendari.ac.id*.
- Prasetyo, K. B. (2022, Juni 13). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *bookchapter.unnes.ac.id*, 5. doi:<https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.48>
- Pratomo, R. R. (2019, Februari 19). Hasil Survey Kegemaran Menonton Film Millennials. Diambil kembali dari rumah millennials: <https://rumahmillennials.com/2019/02/14/hasil-survey-kegemaran-menonton-film-millennials/>
- Prayugo, A. (2024). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024 di SMAN 1 Sewon Bantul Yogyakarta. *eprints.stipan.ac.id*, 1.
- Putra, A. (2015). *Politik Pemilih Muda : Partisipasi Politik Anak Muda di PEkanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura*. Jakarta Selatan: Demos : Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi dan Pamflet. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/402-ID-politik-pemilih-muda-partisipasi-politik-anak-muda-di-pekanbaru-jakarta-cirebon.pdf>
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Research Repository : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Rizki, M. J. (2023, Agustus 29). Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya. Diambil kembali dari [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126?page=2)
- Solichin, M. M. (2021). *Paradigma Konstruktivisme Dalam Belajar dan Pembelajaran*. (A. Nurhadi, Penyunt.) Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Taqiuddin, M. (2025, Januari 7). Ketua KPU Kota Jakarta Selatan. (P. Lestari, Pewawancara)
- Unjianti, M. R. (2021). Gerakan Sosial Generasi Melek Politik (GMP) dalam Memberikan Pendidikan Politik pada Netizen di Ruang Virtual. *eprints.walisongo.ac.id*, 38.
- Wahyudi, G. D. (2022, Juni 13). Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *eprints.ipdn.ac.id*, 4. Dipetik Desember 2024, dari <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7374>
- Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
- Warren, K. (2024, Agustus 27). *Generation Z (Gen Z): Definition, Birth Years, and Demographics*. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/generation-z-gen-z-definition-5218554>
- Winaryati, E. (2019). *Action Research dalam Pendidikan*. Semarang: Unimus Press.

- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th Edition ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications. doi:10.3138/cjpe.30.1.108
- Zulfa, A. N. (2019). Meningkatkan Kesadaran Politik di Kalangan Anak Muda. *ejurnal.unisri.ac.id*, 20. Diambil kembali dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/3054/2622>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran UMSU*, 149. doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>
- Zulkarnain, M. H. (2021). Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 159.